

IMPLEMENTASI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH DALAM PENGUNAAN APLIKASI SRIKANDI DI KOTA BENGKULU

Shella Stepani⁽¹⁾ Novliza Eka Patrisia⁽²⁾
⁽¹⁾⁽²⁾ Universitas Muhammadiyah Bengkulu
shellastepani07@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of archives in the use of the SRIKANDI application in Bengkulu City. The research method used is a qualitative method. The results of this study provide a conclusion that the implementation of policies from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, it can be concluded that the implementation of the use of the SRIKANDI application in Bengkulu City has not been running optimally. This can be seen from the fact that there are still several OPDs that are not yet active and have not been consistent in using the SRIKANDI application in government administration. In the theory of policy implementation from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, it consists of six indicators, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations, organizational characteristics, socio-political and economic environment.

Keywords: Archives, SRIKANDI application

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Bazarah J et al., 2021).

Menurut Conrad, dalam (Patrisia et al., 2021), *e-government* adalah suatu istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal. Definisi tersebut sejalan dengan rumusan Bank Dunia pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa *e- government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti (*Wide Area Network, Internet dan mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan di seluruh dunia. Konsep *e-government* dan *e-governance* hadir sebagai wujud modernisasi dalam proses birokrasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintahan. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan, pendekatan, dan implementasi (Fauzi & Purnamawati, 2025).

Dalam Electronic Government salah satu aplikasi yang digunakan untuk pelayanan

administrasi dan kearsipan bagi pemerintah pusat dan daerah adalah aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Arsip Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara bekerjasama menciptakan sistem aplikasi yang dikenal sebagai SRIKANDI.(Salma et al., 2025)

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi yaitu digunakan secara bertahap oleh lembaga negara dan/atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. SRIKANDI merupakan sarana bantu dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip secara digital dan terintegrasi. (Sistem & Berbasis, 2023)

Arsip berfungsi sebagai sumber informasi krusial bagi suatu institusi. pengelolaan arsip yang efisien dan tepat sasaran akan memudahkan institusi dalam mencari informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat. Di masa digital sekarang ini, pengelolaan arsip secara konvensional menggunakan kertas mulai ditinggalkan dan beralih ke format digital. Untuk mendukung SPBE telah diterbitkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 679 Tahun 2020 mengenai aplikasi umum bidang kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan tujuan memberikan dukungan terhadap SPBE.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan tata kelola internal birokrasi, termasuk dalam bidang kearsipan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menegaskan bahwa kearsipan merupakan salah satu layanan administrasi berbasis elektronik yang mendukung kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Untuk mendukung integrasi dan efisiensi pengelolaan arsip, diterbitkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan, yang menetapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum nasional di bidang kearsipan. SRIKANDI hadir untuk mencegah tumpang tindih aplikasi, meningkatkan mutu layanan arsip, dan menjamin keamanan serta keterpaduan data. Implementasi SRIKANDI membutuhkan pemenuhan prasyarat tertentu, seperti adanya kebijakan penyelenggaraan kearsipan, SDM, sarana prasarana, dan dukungan anggaran.(No Title, 2025)

Aplikasi SRIKANDI merupakan sistem pengelolaan arsip digital yang menyeluruh dan dapat diakses oleh semua instansi pemerintah di Indonesia. Arsip digital ini memungkinkan pencatatan informasi yang tepat, sehingga berperan sebagai alat akuntabilitas dan sebagai ingatan kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (Norul & Dharma, 2024). Pengelolaan arsip di pemerintahan merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat atau diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya menjaga dokumentasi dan memori kelembagaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pelayanan publik yang berkualitas (Rifai, 2025). Pemerintah melakukan inovasi di bidang kearsipan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada 27 Oktober 2020. Peluncuran aplikasi SRIKANDI merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) dalam hal ini aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Regulasi penerapan aplikasi Srikandi tertuang dalam Keputusan MENPAN- RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) dan Peraturan Arsip Nasional

RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. (Yulia Nurul Aini, 2023).

Pedoman penerapan SRIKANDI sebagai aplikasi kearsipan dinamis juga telah tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 SRIKANDI merupakan sistem informasi berbasis elektronik untuk mewujudkan sistem pemerintahan terintegrasi yang dapat digunakan bagi lembaga negara maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kearsipan dengan seluruh arsip dan surat menyurat dapat terekam di jejak digital sehingga menjadi memori kolektif pendukung SPBE.

SRIKANDI memiliki 3 fitur utama yaitu fitur penciptaan arsip, fitur pemeliharaan arsip, dan fitur penggunaan arsip. Fitur penciptaan arsip meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas elektronik antar instansi pemerintah yang terhubung dalam SRIKANDI. Fitur pemeliharaan arsip menjadikan arsip tetap utuh dan kredibel. Fitur penyusutan arsip meliputi pemindahan serta pemusnahan arsip. Terdapat pula fitur penggunaan arsip bagi yang berhak dan setiap ASN diwajibkan memiliki akun SRIKANDI karena dapat merekam jejak kinerja ASN. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan aplikasi SRIKANDI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola serta Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengawas.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan di daerah, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Bengkulu memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebelum diimplementasikannya SRIKANDI, pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu masih dilakukan secara manual. Banyak dokumen penting yang disimpan dalam bentuk fisik sehingga pencarian data sering kali membutuhkan waktu lama, bahkan berisiko hilang atau rusak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakefisienan dalam pekerjaan, lemahnya pengamanan informasi, serta menurunnya akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya keterpaduan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menyebabkan duplikasi data dan hambatan dalam koordinasi administrasi. Penerapan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Melalui digitalisasi arsip dan persuratan, proses penciptaan, pengelolaan, hingga penyusutan arsip dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terintegrasi. Implementasi SRIKANDI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan. Selain itu, keberhasilan penerapan aplikasi ini juga sangat bergantung pada sinergi antara Lembaga Kearsipan Daerah dan seluruh OPD, serta bimbingan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pembina utama bidang kearsipan.

Dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu Bahwasanya Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintahan kota dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan aplikasi SRIKANDI. Lembaga kearsipan daerah memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dan pembinaan di lingkungan pemerintah kota Bengkulu. Tetapi dalam menjalankan aplikasi srikandi lembaga kearsipan daerah masih menghadapi masih tantangan yang dimana masih terdapat banyak OPD yang masih belum sepenuhnya melaksanakan aplikasi SRIKANDI.

Berikut dibawah ini tabel urutan peringkat tingkat keaktifan penggunaan aplikasi SRIKANDI perangkat daerah di kota Bengkulu :

Tabel 1
Data Masuk Dan Keluar Aplikasi Srikandi Dari 2022-2025

Kategori	Jumlah OPD	Presentase
Aktif	12	29,27 %
Sedang	18	43,90 %
Tidak aktif	11	26,38 %
Total	41	100 %

Sumber : Lembaga Kearsipan Daerah 2025

Berdasarkan data yang diatas, terdapat 12 OPD yang masuk kategori aktif, 18 OPD berada dalam kategori sedang, dan 11 OPD tergolong tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPD sebenarnya sudah berada pada tahap pelaksanaan, namun masih belum mencapai tingkat keteraturan dan konsistensi yang kuat. Kelompok OPD yang berada pada kategori sedang dapat diartikan sebagai unit kerja yang memiliki upaya dan sistem dasar kearsipan, tetapi belum berjalan optimal atau belum memiliki standar yang seragam.

Sementara itu, keberadaan 11 OPD yang tidak aktif mengindikasikan adanya hambatan yang lebih serius, baik dalam hal kesadaran kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, maupun perhatian manajerial terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas birokrasi. Jika ditinjau secara lebih mendalam, data ini juga memperlihatkan bahwa kearsipan belum menjadi prioritas yang sepenuhnya merata di antara OPD.

Berdasarkan hasil data awal peneliti menemukan adanya permasalahan dalam menjalankan aplikasi srikandi yang mana dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu Bahwasanya Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintahan kota dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan aplikasi SRIKANDI dan surat edaran Nomor: 000.5.3.1/26/DKP/2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Kota Bengkulu dan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tetapi masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melaksanakan aplikasi SRIKANDI sebagai mana mestinya. Tanpa pembenahan pelaksanaan aplikasi yang ada tersebut, OPD yang saat ini berada dalam kategori sedang berpotensi stagnan, dan OPD yang tidak aktif berisiko semakin jauh tertinggal dalam pemenuhan standar kearsipan, sehingga berpengaruh pada transparansi, pertanggungjawaban publik, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Urgensi penelitian ini ialah meningkatkan penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu dari tahun 2022-2025, Agar pelaksanaan *e - government* yang dijalankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam pelaksanaan aplikasi SRIKANDI dapat berjalan dengan maksimal sebagai manamestinya. Berdasarkan permasalahan dan data awal diatas maka peneliti memfokuskan untuk meneliti judul tentang “ Implementasi Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Menjalankan Aplikasi SRIKANDI Di Kota Bengkulu.”

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2020). Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga Metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian. Dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Priyono, 2023).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bengkulu (ARDA) dengan Alamat Jl. Kuala Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat deskriptif atau informasi. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. Penelitian ini tidak menggunakan besarnya populasi, jika menurut peneliti data terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti pada wilayah penelitian maka penelitian telah cukup.

Penelitian kualitatif ini ditunjukan untuk memahami Pelaksanaan Lembaga Kearsipan Daerah dalam menjalankan penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan informan untuk di wawancarai, observasi, memeberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Sehingga penelitian dapat lebih memahami dan dapat menjelaskan secara mendalam berkaitan dengan penelitian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Kearsipan Daerah mengimplementasikan penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam menjalankan fungsi pengelolaan arsip pemerintahan. Penelitian ini berupaya memahami sejauh mana kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur teknologi berperan dalam keberhasilan penerapan aplikasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada proses pelaksanaan implementasi, yang mencakup mekanisme koordinasi antar-unit kerja, proses pelatihan dan pendampingan, serta hambatan yang muncul baik dari aspek teknis maupun nonteknis.

Tabel 2
Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Aspek Penelitian
Implementasi Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Penggunaan	Standar dan tujuan kebijakan	a. Kejelasan tujuan penerapan SRIKANDI bagi Lembaga Kearsipan Daerah b. Kesesuaian standar operasional dengan kondisi riil/nyata di kota Bengkulu c. Tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan sasaran kebijakan
	Sumber daya Komunikasi antar pelaksana	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya finansial c. Sumber daya teknologi
	Komunikasi antar pelaksana	a. Mekanisme sosialisasi kebijakan
Aplikasi Srikandi Di Kota Bengkulu		b. Alur koordinasi dan supervisi c. Konsistensi informasi dan instruksi kebijakan
	Karakteristik organisasi pelaksana	a. Struktur organisasi dan pembagian tugas b. Prosedur kerja dan mekanisme pengawasan c. Budaya organisasi dalam pengelolaan arsip

Fokus Penelitian	Indikator	Aspek Penelitian
	Lingkungan sosial politik dan ekonomi	a. Dukungan pimpinan daerah dan politik anggaran b. Budaya kerja birokrasi lokal c. Tingkat literasi digital aparaturnya dan OPD.
	Disposisi pelaksana	a. Tingkat penerimaan terhadap perubahan sistem kearsipan b. Motivasi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan c. Resistensi atau adaptasi terhadap digitalisasi arsip.

Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan penggunaan Aplikasi SRIKANDI oleh Lembaga Kearsipan Daerah di Kota Bengkulu secara menyeluruh. Fokus penelitian ini mencakup aspek standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi para pelaksana kebijakan. Penelitian ini memandang bahwa keberhasilan implementasi Aplikasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, struktur dan budaya organisasi, dukungan lingkungan eksternal, serta sikap dan komitmen aparaturnya dalam menjalankan kebijakan.

Oleh karena itu, pengkajian terhadap berbagai aspek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi implementasi kebijakan kearsipan digital di Kota Bengkulu. Dengan adanya fokus penelitian ini, diharapkan penelitian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan kearsipan digital di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber ahli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data yang diperoleh langsung dari informan yang berupa keterangan atau fakta-fakta.

Data sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen media ataupun web resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bengkulu atau catatan yang ada pada tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media.

Penentuan Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Untuk memperoleh data secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu informan pokok dan informan pendukung. Informan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bengkulu dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 3
Penentuan Tabel Informan

No	Informan	Jumlah Informan	Alasan Pemilihan Informan
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bengkulu	1	Memiliki kewenangan strategis dalam perumusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan implementasi Aplikasi SRIKANDI di lingkungan kota Bengkulu.
2.	Kepala Bidang / Pejabat yang membidangi kearsipan digital	1	Mengetahui proses secara langsung proses perencanaan, koordinasi, serta hambatan kebijakan dalam penerapan aplikasi SRIKANDI.
3.	Operator / Admin utama Aplikasi SRIKANDI pada LKD	1	Menangani operasional teknis sistem, memahami kendala teknis dan adaptasi pengguna.
4.	Admin SRIKANDI pada OPD yang aktif menggunakan aplikasi	2	Memberikan Gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di tingkat OPD yang telah menjalankan system secara aktif.

No	Informan	Jumlah Informan	Alasan Pemilihan Informan
5	Admin SRIKANDI pada OPD yang aktif menggunakan aplikasi	2	Memberikan informasi mengenai faktor – faktor penghambat dalam penerapan aplikasi SRIKANDI pada perangkat daerah yang belum optimal

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berjudul ” Implementasi Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Menjalankan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Di Kota Bengkulu. Diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari: Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur mengenai Aplikasi SRIKANDI pada penyelenggara Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bengkulu yaitu Lembaga Kearsipan Daerah dimana pelaksanaannya sesuai atau tidaknya dengan isi dari peraturan walikota peraturan walikota Bengkulu pasal 1 ayat (4) Nomor 61 tahun 2019.

Observasi

Dengan adanya observasi penelitian dapat mengetahui proses pelaksanaan Lembaga Kearsipan Daerah dalam melaksanakan Aplikasi SRIKANDI dan faktor penghambat dalam menjalankan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu agar observasi dapat dipertanggung jawabkan penelitian tidak harus berfokus kepada satu orang saja, namun kepada pihak lain juga nanti hasilnya dari observasi ini dapat di pertanggung jawabkan.

Dokumentasi

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung dan menganalisis data yang sudah diperoleh peneliti yang berhubungan dengan pelaksanaan Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Menjalankan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI . Dalam penelitian ini dokumentasi yang dapat berupa foto-foto selama berobservasi wawancara, hasil skripsi atau penelitian terdahulu dan pendukung yang memiliki tempat penelitian dengan tujuan memberikan informasi terkait objek yang diamati.

Keabsahan Data

Berdasarkan Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapat selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif

Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jenis triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. (tambahkan narasi)

Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang akan di wawancarai pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan. Data yang telah diperoleh, dianalisis peneliti untuk mengambil kesimpulan dan dilakukan member *check* (kesepakatan).

Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara di cek melalui dokumen yang diperoleh wawancara dengan narasumber Dinas Arsip Dan Perpustakaan observasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan penjelasan Triangulasi diatas peneliti memilih Triangulasi sumber karena fokus kajian terletak pada implementasi dan persepsi para aktor yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta memastikan konsistensi informasi, mengingat setiap aktor memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda terhadap pelaksanaan layanan digital.

Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut (Sugiyono, 2020) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (2014) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi Kondensasi data., merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana Lembaga Kearsipan Daerah mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI.

Proses reduksi dilakukan dengan menelaah kembali seluruh data lapangan untuk menemukan tema-tema penting seperti peran lembaga dalam pelaksanaan aplikasi, kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, kebijakan kearsipan daerah, dan hambatan dalam penerapan sistem. Melalui tahap ini, data yang semula masih mentah dan luas diolah menjadi lebih terarah sesuai tujuan penelitian.

Penyajian data., merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika kesimpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif merupakan teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Data yang telah dipilih kemudian disajikan berupa pendapat-pendapat informan mengenai pelaksanaan Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Menjalankan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Kota Bengkulu

Penarikan kesimpulan., dalam penelitian ini setelah data mengenai Pelaksanaan Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Menjalankan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Kota Bengkulu Kota Bengkulu terkumpul, hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh penulis adalah meneliti kembali data tersebut yang kemudian dapat disajikan dan ditarik kesimpulannya

HASIL

Proses yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan selesai adalah proses pengolahan data. Proses pengolahan data ini selanjutnya menjadi hasil penelitian yang sistematis. Hasil penelitian berupa fakta dan data mengenai implementasi Lembaga kearsipan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu proses penelitian berlangsung., yaitu pada bulan April 2026.

Tabel 4
Data Masuk Dan Keluar Aplikasi Srikandi Dari 2022-2025

Kategori	Jumlah OPD	Presentase
Aktif	12	29,27 %
Sedang	18	43,90 %
Tidak aktif	11	26,38 %
Total	41	100 %

Sumber : Lembaga Kearsipan Daerah 2025

Pembahasan penelitian ini berbentuk fakta dan temuan lapangan yang telah dideskripsikan serta dianalisis penulis. Pada pembahasan ini Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara yang dilakukan pada bulan April. Pada bab ini pembahasan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disertakan gambar yang akan di lampirkan sebagai kelengkapan data yang telah di peroleh melalui wawancara dan observasi. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berpedoman pada teori dari Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 1975, dengan enam dimensi yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, lingkungan sosial politik dan ekonomi, disposisi pelaksana.

Implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu

Implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang memiliki peran sebagai pembina dan pengawas pengelolaan arsip di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, implementasi ini melibatkan seluruh OPD sebagai pengguna aplikasi dalam mendukung sistem administrasi berbasis elektronik. Berdasarkan observasi dan wawancara, implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya perbedaan tingkat penggunaan di setiap OPD, dimana terdapat OPD yang sudah aktif menggunakan aplikasi, namun masih ada pula yang belum memanfaatkan aplikasi secara maksimal. Informan (MS,EA,SW) Adalah Lembaga Kearsipan Daerah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu. Mereka mengatakan:

Standar dan Tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Bengkulu memiliki standar dan tujuan kebijakan jelas. Standar dan tujuan kebijakan penerepan aplikasi SRIKANDI dikota Bengkulu telah memiliki Dasar yang jelas yaitu pada peraturan walikota Bengkulu nomor 36 pasal 2 tahun 2022 tentang pedoman penerapan aplikasi SRIKANDI dan surat edaran Nomor : 000.5.3.1/26/DKP/2023 tentang penerapan aplikasi SRIKANDI. Serta tujuan utama Implementasi aplikasi SRIKANDI Adalah untuk menciptakan system pengelolaan arsip yang terintegrasi secara digital, meningkatkan efesiensi administrasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan bahwa pemahaman terhadap tujuan kebijakan tersebut belum merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Pihak dinas perpustakaan daerah dan kearsipan sebagai Lembaga kearsipan daerah (LKD) memahami bahwa SRIKANDI merupakan pengelolaan arsip secara menyeluruh, mulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip. Sementara itu, sebagian OPD masih memandang SRIKANDI hanya sebagai aplikasi persuratan elektronik dan sebgai kepala OPD merasa Aplikasi tidak aman dan takut akan kebocoran data. Informan (MS,EA,SW) Adalah Lembaga Kearsipan Daerah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu. Mereka mengatakan:

“Implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sudah mulai berjalan dan menunjukkan

perkembangan yang cukup baik. Terlihat dari sudah adanya beberapa OPD yang aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI. Namun, kami juga mengakui bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat OPD yang belum aktif menggunakan aplikasi secara maksimal, baik karena kurangnya dukungan dari pimpinan walikota dan keterbatasan sumber daya manusia maupun kendala teknis lainnya. Oleh karena itu, kami terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar implementasi SRIKANDI dapat berjalan lebih merata di seluruh OPD. Kemudian untuk petunjuk penggunaan aplikasi bisa dilihat <https://layanan.arsip.go.id/> “ (MS, usia 58 Tahun, 28 April 2026)

“Penggunaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu memang sepenuhnya belum berjalan sesuai yang diharapkan, dari sisi kebijakan dan system sudah cukup jelas dan mendukung. Pelaksanaan aplikasi SRIKANDI ini masih terapat beberapa kendala seperti belum meratanya pemahaman pelaksanaan di OPD, keterbatasan pelatihan dan pendampingan juga faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi SRIKANDI. “ (EA, usia 45 Tahun, 28 April 2026)

“Kalau penggunaan aplikasi di OPD, aplikasi SRIKANDI sebenarnya sudah mulai digunakan, terutama untuk pengelolaan surat masuk dan keluar. Namun, masih ada beberapa kendala yang kami rasakan. Misalnya, jaringan internet yang kadang tidak stabil, serta masih ada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi ini. Selain itu, karena biasanya hanya satu orang yang menjadi operator, beban kerja juga cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan implementasi SRIKANDI sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pekerjaan sehari-hari.” (SW, Usia 49 Tahun, 28 April 2026)

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait dengan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komitmen pimpinan walikota dan masih adanya perbedaan tingkat penggunaan di setiap OPD, dimana terdapat OPD yang sudah aktif menggunakan aplikasi, namun masih ada pula yang belum memanfaatkan aplikasi secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas point standar dan tujuan kebijakan dari implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa surat edaran tentang penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan kota Bengkulu, diketahui bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas dalam penerapan aplikasi SRIKANDI.

Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan seluruh OPD agar melaksanakan pengelolaan arsip secara digital dan terintegrasi. Hal ini berkaitan dengan indikator standar dan tujuan kebijakan karena implementasi aplikasi SRIKANDI dilaksanakan berdasarkan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi, sumber daya yang dimiliki masih belum sepenuhnya memadai. Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi. Pada beberapa OPD, pengelolaan aplikasi hanya dilakukan oleh satu orang operator, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penggunaan aplikasi. Dari sisi teknologi, masih ditemukan kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat komputer. Kondisi ini menyebabkan proses penggunaan aplikasi menjadi terhambat. Selain itu, dari sisi finansial, dukungan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sistem juga masih terbatas. Hal ini berdampak pada kurangnya peningkatan kapasitas pelaksana dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Informan (Setiyowati) Selaku operator Lembaga Kearsipan Daerah. Dia mengatakan :

” Dari sisi LKD, kami sudah berupaya menyediakan dukungan yang diperlukan, baik melalui sosialisasi maupun pendampingan. Namun, untuk 2 tahun terakhir sosialisasi memang tidak ada dikarenakan tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi tersebut, tpi meskipun tidak ada anggaran kami tetap memantau via WA jika ada kendala dalam penggunaan aplikasi Srikandi. Kemudian praktiknya, masih banyak OPD yang mengalami kendala karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Misalnya, tidak semua OPD memiliki operator yang benar-benar memahami aplikasi, serta masih adanya kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil. Jadi bisa dikatakan sumber daya yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi secara optimal.” (SW, 49 Tahun 28 April 2026)

Dari pernyataan diatas mengenai keterbatasan sumber daya dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu OPD yang aktif dan OPD yg tidak aktif dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI kota Bengkulu (Beni Wahyudi, Netti Susmiyati)

“Kalau di dinas kami, sumber daya untuk penggunaan SRIKANDI sudah cukup mendukung, karena sudah ada operator yang memahami penggunaan aplikasi dan fasilitas yang cukup memadai. Namun, tetap ada beberapa kendala teknis seperti jaringan internet yang kadang tidak stabil. Meskipun begitu, secara umum kami masih bisa menjalankan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi sehari-hari.” (BW, 47 Tahun, 30 April 2026)

“Untuk saat ini, sumber daya di dinas kami masih belum memadai untuk mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi, kurangnya pelatihan, serta fasilitas yang belum mendukung sepenuhnya. Selain itu, belum adanya tenaga khusus yang menangani aplikasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya “ (NS, 50 Tahun, 30 April 2026)

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait dengan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu belum sepenuhnya memadai karena keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, dan kurangnya pelatihan serta kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas point sumber daya dari implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian terlihat adanya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi SRIKANDI yang diikuti oleh operator pada beberapa OPD di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami tata cara penggunaan aplikasi SRIKANDI, mulai dari pengelolaan surat, pengarsipan digital, hingga proses administrasi berbasis elektronik. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah telah melakukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan kearsipan digital.

Hal ini berkaitan dengan indikator sumber daya dalam teori Van Meter dan Van Horn, karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis tersebut, pegawai diharapkan mampu memahami dan menjalankan aplikasi SRIKANDI secara lebih efektif dalam mendukung tata kelola arsip digital di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Komunikasi antar pelaksana

Komunikasi antar pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada OPD. Namun, berdasarkan hasil penelitian, komunikasi tersebut belum berjalan secara optimal. Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat awal dan belum diikuti dengan pendampingan secara berkelanjutan. Selanjutnya dalam 2 tahun terakhir bimbingan teknis tentang aplikasi SRIKANDI itu hanya lewat via Wa itu pun hanya jika OPD mengalami kesulitan seperti aplikasi eror atau beberapa

tools tidak muncul. Informan (Erika Eriesanti) selaku kepala bidang Lembaga kearsipan daerah dia mengatakan :

“Komunikasi terkait implementasi aplikasi SRIKANDI sebenarnya sudah kami lakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis dan bimbingan via WA kepada seluruh OPD. Namun, kami selaku tim Helpdesk menyadari bahwa penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan menerapkan aplikasi secara optimal Kami sudah melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada OPD, tetapi dalam praktiknya tidak semua OPD aktif berkomunikasi. Kadang kami harus menunggu OPD melapor jika ada kendala, sehingga komunikasi belum berjalan secara dua arah. “ (EA, 45 Tahun 2026)

Dari pernyataan diatas mengenai komunikasi dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI telah dilakukan tpi belum sepenuhnya mendukung. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu OPD yang aktif dan OPD yg tidak aktif dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI kota Bengkulu (Beni Wahyudi, Netti Susmiyati) mereka mengatakan :

“ Kami cukup sering mendapatkan informasi dan arahan dari LKD, misal aplikasi nya eror atau aplikasi nya tidak dapat dibuka sehingga komunikasi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Namun, kadang masih ada informasi yang kurang jelas, terutama jika tidak disertai dengan pendampingan langsung” (BW, 47 Tahun, 30 April 2026)

“ Kami merasa komunikasi sudah jelas, semua informasi yang diberikan dapat kami pahami dengan baik. Tetapi tidak adanya pendampingan secara langsung membuat kami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI. “(NS, 50 Tahun, 30 April 2026)

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait dengan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar pelaksana dalam implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu belum sepenuhnya memadai karena kurangnya Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat awal dan belum diikuti dengan pendampingan secara berkelanjutan. Selanjutnya dalam 2 tahun terakhir bimbingan teknis tentang aplikasi SRIKANDI itu hanya lewat via Wa saja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas komunikasi antar pelaksana dari implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi penerapan aplikasi SRIKANDI, terlihat adanya komunikasi antara Lembaga Kearsipan Daerah dengan OPD di Kota Bengkulu. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui penyampaian informasi, pembinaan, dan koordinasi kepada pelaksana di masing-masing OPD. Hal ini berkaitan dengan indikator komunikasi antar pelaksana karena keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan penyampaian informasi yang jelas dan konsisten agar seluruh pelaksana memahami prosedur penggunaan aplikasi SRIKANDI. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana memiliki pengaruh yang cukup besar dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai LKD telah memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas kearsipan yaitu tim HELPDESK. Namun meskipun tim HELPDESK sudah dibentuk, kenyataanya pengelolaan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja organisasi.

Pada tingkat OPD, pengelolaan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja organisasi. Masih terdapat OPD yang belum memiliki pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan arsip digital. Selain itu, prosedur kerja dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan aplikasi juga belum berjalan secara optimal. Dari sisi budaya organisasi, sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan sistem manual, sehingga proses adaptasi terhadap sistem digital membutuhkan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, baik dari aspek struktur, prosedur, maupun budaya kerja, masih menjadi tantangan dalam implementasi aplikasi SRIKANDI. Informan (Erika Ariesanti) selaku kepala

bidang penyelenggaraan kearsipan mengatakan :

“Secara kelembagaan, struktur organisasi dalam pengelolaan kearsipan sudah jelas. Namun, pada tingkat OPD, belum semua unit kerja menjadikan pengelolaan arsip digital sebagai bagian utama dalam sistem kerja mereka, Ada OPD yang sudah menyesuaikan sistem kerja dengan aplikasi SRIKANDI, tetapi ada juga yang masih menggunakan cara manual karena belum terbiasa dengan sistem digital.” (EA, 47 Tahun, 28 April 2026)

Dari pernyataan diatas mengenai karakteristik organisasi pelaksana dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI belum mendukung. Hal ini bisa ditunjukan belum meratanya pembagian tugas, lemahnya integrasi aplikasi dalam sistem kerja, serta budaya organisasi yang masih cenderung manual.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu OPD yang aktif dan OPD yg tidak aktif dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI kota Bengkulu (Beni Wahyudi, Netti Susmiyati) mereka mengatakan :

“ Di dinas kami sudah ada pembagian tugas yang jelas terkait penggunaan SRIKANDI, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik tapi meskipun berjalan dengan baik kami tidak sepenuhnya juga menggunakan aplikasi SRIKANDI ada beberapa surat prosesnya masih kami buat secara manual. (BW 47 Tahun 30 April 2026)

“Di dinas kami belum ada pembagian tugas yang khusus untuk pengelolaan SRIKANDI, sehingga penggunaannya belum menjadi prioritas dalam pekerjaan sehari-hari .“ (NS, 50 Tahun, 30 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pemerintah Kota Bengkulu telah membentuk Tim Helpdesk melalui Surat Keputusan sebagai bentuk dukungan organisasi dalam implementasi aplikasi SRIKANDI. Namun, dalam pelaksanaannya tim tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya OPD yang mengalami kendala penggunaan aplikasi tetapi belum mendapatkan pendampingan secara maksimal. Selain itu, koordinasi antara Tim Helpdesk dan OPD juga belum berjalan secara intensif, sehingga beberapa OPD masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas karakteristik organisasi pelaksana dari implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI .

Berdasarkan hasil dokumentasi struktur organisasi dan pembagian tugas operator SRIKANDI, terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu memiliki pembagian peran dalam pelaksanaan pengelolaan arsip digital. Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya penunjukan admin dan operator yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aplikasi SRIKANDI. Hal ini berkaitan dengan indikator karakteristik organisasi pelaksana karena struktur organisasi dan pembagian tugas mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan pemerintahan.

Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi turut mempengaruhi implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Secara kebijakan, penerapan aplikasi ini telah didukung oleh regulasi nasional maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, dukungan tersebut belum sepenuhnya dapat dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan walikota langsung maupun seluruh pimpinan OPD. Beberapa OPD menunjukkan dukungan yang baik, sementara yang lainnya masih kurang optimal dalam menerapkan aplikasi SRIKANDI. Selain itu, tingkat literasi digital aparatur juga masih bervariasi, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Infroman (setiyowati) selaku operator aplikasi SRIKANDI di Lembaga kearsipan daerah dia mengatakan :

“Pada awal penerapan aplikasi SRIKANDI, implementasi memang cukup aktif dilakukan karena adanya dorongan dan perhatian dari pimpinan daerah pada saat itu. Namun, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, fokus kebijakan pemerintah daerah juga mengalami penyesuaian sesuai dengan prioritas pimpinan yang baru. Dan Kami melihat bahwa faktor

lingkungan kerja dan kebiasaan pegawai juga mempengaruhi. Pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem manual cenderung lebih sulit beradaptasi. Dan dalam pelaksanaannya, dukungan dari masing-masing OPD masih belum merata.” (SW, 49 Tahun 28 April 2026)

Dari pernyataan diatas mengenai lingkungan sosial, politik ,dan ekonomi dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI belum mendukung. Hal ini bisa ditunjukan belum meratanya dukungan tersebut belum merata, terutama dari sisi komitmen pimpinan walikota, OPD dan kesiapan aparatur.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu OPD yang aktif dan OPD yg tidak aktif dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI kota Bengkulu (Beni Wahyudi, Netti Susmiyati) mereka mengatakan :

“Pimpinan di dinas kami cukup mendukung penggunaan SRIKANDI, sehingga kami terdorong untuk menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari.” (BW, 47 Tahun 30 April 2026)

“Di dinas cukup mendukung penggunaan SRIKANDI. Namun belum ada dorongan yang kuat dari pimpinan untuk menggunakan aplikasi ini, sehingga penggunaannya masih belum maksimal.” (NS, 50 Tahun, 30 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan sosial politik dan ekonomi memiliki pengaruh terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Pergantian kepemimpinan daerah menyebabkan adanya perubahan fokus dan prioritas kebijakan, sehingga tingkat dukungan serta pengawasan terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI menjadi berkurang. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya konsistensi penggunaan aplikasi di beberapa OPD.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, implementasi aplikasi SRIKANDI mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2023. Namun, setelah terjadinya pergantian pimpinan daerah, penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara optimal pada beberapa OPD. Dokumentasi dan hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi persuratan masih sebagian menggunakan sistem manual sehingga penggunaan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam tata kelola administrasi pemerintahan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan indikator lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam teori Van Meter dan Van Horn, karena dukungan pimpinan dan arah kebijakan birokrasi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen organisasi dalam melanjutkan program digitalisasi administrasi, termasuk penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Disposisi pelaksana Disposisi atau sikap pelaksana terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan menerima penggunaan aplikasi sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pemerintahan. Namun, di sisi lain, masih terdapat pelaksana yang menunjukkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan dalam mengoperasikan teknologi, kebiasaan menggunakan sistem manual, serta anggapan bahwa penggunaan aplikasi menambah beban kerja. Selain itu, motivasi dan komitmen pelaksana juga belum merata, sehingga mempengaruhi konsistensi dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Informan (Erika ariesanti) selaku kepala bidang penyelenggaraan kearsipan, dia mengatakan :

“Secara umum, pelaksana menerima adanya aplikasi SRIKANDI, namun tingkat keseriusan dalam penggunaannya masih berbeda- beda di setiap OPD. Kami melihat masih ada pegawai yang kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi, sehingga lebih memilih menggunakan cara manual.” (EA, 47 Tahun, 28 April 2026)

Dari pernyataan diatas mengenai disposisi pelaksana dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI belum mendukung. Hal ini bisa ditunjukan variasi yang cukup signifikan, sebagian pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung penggunaan aplikasi, namun masih terdapat pelaksana yang menunjukkan resistensi akibat keterbatasan kemampuan dan kebiasaan menggunakan sistem manual..

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu OPD yang aktif dan OPD yg tidak aktif dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI kota Bengkulu (Beni Wahyudi, Netti Susmiyati) mereka mengatakan :

“Kami sebagai pengguna aplikasi SRIKANDI menerima penggunaan SRIKANDI karena memang membantu pekerjaan, meskipun di awal perlu penyesuaian.” (BW, 47 Tahun 30 April 2026)

“Sebagian pegawai masih merasa kesulitan menggunakan aplikasi, sehingga lebih nyaman menggunakan sistem lama. (NS, 50 Tahun 30 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa disposisi pelaksan memiliki pengaruh dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Sebagian pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan menerima penggunaan aplikasi Namun, di sisi lain, masih terdapat pelaksana yang menunjukkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan dalam mengoperasikan teknologi, kebiasaan menggunakan sistem manual, serta anggapan bahwa penggunaan aplikasi menambah beban kerja.

Faktor – faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI di kota Bengkulu Standar Dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi, hambatan pada indikator standar dan tujuan kebijakan terlihat dari masih adanya perbedaan pemahaman antar OPD mengenai tujuan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Sebagian pelaksana masih menganggap aplikasi hanya digunakan untuk surat menyurat elektronik, sedangkan fungsi pengelolaan arsip digital belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, pemahaman terhadap standar dan prosedur penggunaan aplikasi juga belum merata di setiap OPD. Informan (Mukhlis , 58 Tahun, 28 April 2026) adalah kepala Lembaga Kearsipan Daerah dia menyatakan :

” Secara aturan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebenarnya sudah jelas dan sudah disampaikan kepada seluruh OPD. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa OPD yang belum memahami fungsi aplikasi secara menyeluruh. Sebagian masih menganggap aplikasi hanya digunakan untuk surat menyurat saja” (M, 58 Tahun 28 April 2026).

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“Kalau di OPD kami penggunaan aplikasi sudah cukup dipahami karena memang sering digunakan untuk persuratan. Tapi memang untuk fitur arsip digital belum semuanya digunakan karena masih dalam penyesuaian “ (BW, 47 Tahun 30 April 2026).

“Sebagian pegawai kami masih belum terlalu memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI secara keseluruhan. Jadi penggunaan aplikasi biasanya hanya dilakukan oleh operator tertentu saja” (NS 50 Tahun , 30 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan hambatan pada standar dan tujuan kebijakan yaitu : kurangnya Pemahaman pelaksana terhadap tujuan aplikasi belum meratan, Sebagian OPD masih memahami SRIKANDI hanya sebagai aplikasi persuratan dan Standar penggunaan aplikasi belum dipahami secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas standar dan tujuan kebijakan dari faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa Surat Keputusan (SK) tentang penerapan dan penunjukan pengelola aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, diketahui bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar kebijakan dan pedoman pelaksanaan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. SK tersebut menunjukkan adanya standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan secara formal sebagai upaya mendukung digitalisasi administrasi kearsipan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara,mimplementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal pada beberapa OPD. Meskipun telah terdapat SK sebagai dasar pelaksanaan, masih ditemukan penggunaan administrasi persuratan secara manual dan belum seluruh perangkat daerah aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan standar kebijakan belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Hal ini berkaitan dengan indikator standar dan tujuan kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn, karena kejelasan aturan perlu diiringi dengan pemahaman dan pelaksanaan yang optimal oleh seluruh pelaksana kebijakan.

Sumber Daya

Hambatan pada indikator sumber daya terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Beberapa OPD hanya memiliki satu

operator yang menangani aplikasi, sehingga ketika operator tidak berada di tempat penggunaan aplikasi menjadi terhambat. Selain itu, masih terdapat kendala jaringan internet yang kurang stabil serta kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi yang belum merata. Informan (Erika Eriesanti) selaku kepala bidang penyelenggaraan kearsipan dia mengatakan :

“Kendala yang sering terjadi itu biasanya karena tidak semua pegawai memahami penggunaan aplikasi. Selain itu, di beberapa OPD penggunaan aplikasi masih bergantung pada satu operator saja, sehingga ketika operator tidak berada di tempat pekerjaan menjadi terhambat.” (EA, 45 Tahun 2026)

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“Kalau di OPD kami penggunaan aplikasi sudah berjalan cukup baik karena operatornya memang aktif menggunakan aplikasi. Namun kadang masih terkendala jaringan internet yang tidak stabil “ (BW 47 Tahun, 30 April 2026)

“Sebagian pegawai masih belum memahami penggunaan aplikasi, jadi biasanya hanya operator tertentu saja yang menggunakan aplikasi SRIKANDI. Selain itu, fasilitas komputer dan jaringan internet juga kadang menjadi kendala” (NS, 50 Tahun 30 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa sumber daya dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya jumlah operator di beberapa OPD, kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi yang belum merata, serta kendala fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan komputer. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas Sumber Daya dari faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil dokumentasi terlihat adanya keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang belum stabil dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Selain itu, masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya hambatan pada aspek sumber daya, baik sumber daya teknologi maupun sumber daya manusia. Kondisi ini berkaitan dengan indikator sumber daya karena keterbatasan sarana dan kemampuan teknis pegawai dapat mempengaruhi efektivitas implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Komunikasi Antar Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara LKD dan OPD sebenarnya sudah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi. Namun, komunikasi tersebut belum berjalan secara maksimal. Karena Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat awal dan belum diikuti dengan pendampingan secara berkelanjutan. Dan Masih terdapat OPD yang kurang aktif melakukan koordinasi ketika mengalami kendala penggunaan aplikasi. Selain itu, informasi mengenai penggunaan aplikasi belum sepenuhnya tersampaikan kepada seluruh pegawai. Informan (Setiyowati) selaku operator SRIKANDI di kota Bengkulu dia mengatakan :

“Dalam penerapan aplikasi SRIKANDI kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Namun, memang sosialisasi hanya dilakukan dalam 2 terakhir selebihnya hanya via WA saja dan belum semua pegawai memahami penggunaan aplikasi karena biasanya yang mengikuti sosialisasi hanya operator tertentu saja”.(S, 49 Tahun, 28 April 2026).

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“Koordinasi dengan pihak LKD cukup membantu ketika kami mengalami kendala penggunaan aplikasi. Biasanya kami langsung bertanya melalui grup atau menghubungi admin LKD”. (BW 47 Tahun 30 April 2026)

Sosialisasi memang pernah dilakukan, tetapi tidak semua pegawai mengikuti kegiatan tersebut sehingga sebagian pegawai masih belum memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI “. (NS,50 Tahun, 30 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi antar pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, dan

pendampingan antara LKD dengan OPD. Namun, penyampaian informasi penggunaan aplikasi masih belum berjalan secara merata karena sosialisasi umumnya hanya diikuti oleh operator tertentu saja. Selain itu, koordinasi dan pendampingan penggunaan aplikasi juga belum berjalan secara maksimal di seluruh OPD sehingga masih terdapat pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas Komunikasi Antar pelaksana dari faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan koordinasi dan sosialisasi, diketahui bahwa komunikasi antar pelaksana belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh pada seluruh OPD. Dokumentasi tersebut menunjukkan masih adanya kendala dalam penyampaian informasi terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI. Hal ini berkaitan dengan indikator komunikasi antar pelaksana karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antar pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Hambatan pada indikator karakteristik organisasi pelaksana terlihat dari belum optimalnya kesiapan organisasi dalam mendukung implementasi aplikasi SRIKANDI. Meskipun telah dibentuk Tim Helpdesk melalui Surat Keputusan, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Selain itu, masih terdapat OPD yang belum memiliki pembagian tugas yang jelas terkait penggunaan aplikasi. Informan (Setiyowati) selaku operator SRIKANDI di lembaga kearsipan daerah dia menyatakan :

“ Untuk mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI, pemerintah daerah sudah membentuk Tim Helpdesk dan menunjuk operator di setiap OPD. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa OPD yang penggunaan aplikasinya hanya bergantung pada satu operator tertentu. (S, 49 Tahun 28, April 2026)

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“ Di OPD kami sudah ada operator yang bertanggung jawab menggunakan aplikasi SRIKANDI sehingga penggunaan aplikasi cukup terbantu. Tetapi memang sebagian pegawai lain masih belum terlalu memahami penggunaan aplikasi”. (BW, 47 Tahun, 30 April 2026)

“Penggunaan aplikasi di OPD kami masih lebih banyak dilakukan oleh operator tertentu saja. Kalau operator tidak ada biasanya penggunaan aplikasi ikut terhambat” (NS, 50 Tahun, 30 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah memiliki struktur pelaksana melalui pembentukan Tim Helpdesk dan penunjukan operator di setiap OPD. Namun, dalam pelaksanaannya pembagian tugas penggunaan aplikasi belum berjalan secara maksimal karena penggunaan aplikasi masih bergantung pada operator tertentu. Selain itu, pendampingan teknis dan koordinasi internal organisasi juga belum berjalan secara optimal sehingga mempengaruhi pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas Komunikasi Antar pelaksana dari faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan tim helpdesk aplikasi SRIKANDI, pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan struktur pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan tugas tim helpdesk belum berjalan secara optimal karena beberapa pelaksana masih merangkap pekerjaan lain serta koordinasi antar pelaksana belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi secara formal belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi aplikasi SRIKANDI secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan indikator karakteristik organisasi pelaksana karena efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan fungsi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas dalam organisasi.

Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi

Hambatan pada indikator lingkungan sosial dan politik terlihat dari adanya perubahan dukungan terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI setelah pergantian pimpinan daerah. Dukungan dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi di beberapa OPD mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi tingkat keaktifan penggunaan aplikasi. Selain itu, budaya kerja pegawai yang masih

terbiasa menggunakan sistem manual juga menjadi hambatan dalam penerapan aplikasi. Informan (Mukhlis) selaku kepala Lembaga kearsipan daerah dia mengatakan :

“ Pada awal penerapan aplikasi SRIKANDI, penggunaan aplikasi cukup aktif karena adanya dukungan dan perhatian dari pimpinan daerah terhadap digitalisasi administrasi pemerintahan. Namun setelah terjadi pergantian pimpinan, perhatian terhadap penggunaan aplikasi mulai berkurang sehingga beberapa OPD menjadi kurang aktif dalam menggunakan aplikasi “. (M, 58 Tahun , 28 April 2026)

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“ Di OPD kami penggunaan aplikasi masih tetap berjalan karena memang sudah menjadi kebutuhan administrasi. Namun memang tidak semua pegawai langsung bisa menyesuaikan penggunaan aplikasi digital” (BW, 47 Tahun, 30 April 2026).

Sebagian pegawai masih merasa lebih mudah menggunakan sistem manual dibandingkan aplikasi. Selain itu, perhatian terhadap penggunaan aplikasi sekarang juga tidak terlalu diperhatikan seperti sebelumnya. (NS,50 Tahun 30 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan sosial dan politik dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan aplikasi. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya perhatian dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi setelah terjadi pergantian pimpinan daerah. Selain itu, budaya kerja sebagian pegawai yang masih terbiasa menggunakan sistem manual menyebabkan proses adaptasi terhadap penggunaan aplikasi digital berjalan cukup lambat. Kondisi tersebut mempengaruhi tingkat konsistensi penggunaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini juga memperoleh dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperjelas lingkungan sosial politik, ekonomi dari faktor penghambat penggunaan aplikasi SRIKANDI. Berdasarkan hasil dokumentasi berupa tangkapan layar komunikasi koordinasi antar pelaksana, diketahui bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI masih mengalami hambatan dalam dukungan pelaksanaan di lingkungan OPD. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam administrasi persuratan sehingga koordinasi terkait penggunaan SRIKANDI belum berjalan secara konsisten.

Kondisi tersebut berkaitan dengan indikator lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam teori Van Meter dan Van Horn karena dukungan lingkungan birokrasi dan komitmen organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya konsistensi dukungan terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal di beberapa perangkat daerah.

Disposisi Pelaksana

Hambatan pada indikator disposisi pelaksana terlihat dari masih adanya pelaksana yang kurang siap dan kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI. Sebagian pegawai merasa penggunaan aplikasi menambah beban kerja dan lebih nyaman menggunakan sistem manual. Selain itu, komitmen pelaksana dalam menggunakan aplikasi juga belum merata di setiap OPD. Informan (Mukhlis) selaku kepala Lembaga kearsipan daerah kota Bengkulu, dia mengatakan :

“Kalau dilihat di lapangan memang masih ada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi SRIKANDI. Jadi kadang penggunaan aplikasinya belum konsisten, apalagi kalau pegawai tersebut lebih nyaman menggunakan cara manual.” (M, 58 Tahun, 28 April 2026).

Informan (Beni Wahyudi dan Netti Sumiyati) Adalah OPD aktif dan OPD tidak aktif mereka mengatakan :

“Di awal memang cukup sulit menyesuaikan penggunaan aplikasi karena belum terbiasa. Tapi setelah sering digunakan sebenarnya aplikasi cukup membantu pekerjaan.” (BW, 47 Tahun 30 April 2026).

“Sebagian pegawai kami masih lebih nyaman menggunakan cara manual karena sudah terbiasa dari dulu. Jadi penggunaan aplikasi kadang belum berjalan terus-menerus”. (NS, 50 Tahun 30 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa, hambatan pada disposisi atau sikap pelaksana dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI masih terlihat dari kebiasaan sebagian pegawai yang lebih nyaman menggunakan sistem manual dibandingkan aplikasi digital. Selain itu, masih ada pegawai yang belum percaya diri dan belum terbiasa menggunakan aplikasi sehingga penggunaan SRIKANDI di beberapa OPD belum berjalan secara konsisten.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian, masih ditemukan beberapa pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam administrasi persuratan sehari-hari. Sebagian pelaksana masih menggunakan sistem manual karena merasa lebih mudah dan telah

terbiasa dengan pola kerja sebelumnya. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi sehingga merasa kurang percaya diri dalam penggunaan sistem digital.

Kondisi tersebut berkaitan dengan indikator disposisi pelaksana dalam teori Van Meter dan Van Horn karena sikap, penerimaan, dan kesiapan pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Rendahnya adaptasi sebagian aparatur terhadap perubahan sistem kerja digital menjadi salah satu faktor penghambat implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu.

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Implementasi Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini yang diharapkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba menganalisis tentang Implementasi Lembaga Kearsipan Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada subbab ini penulis mencoba menganalisis masalah- masalah yang terjadi berdasarkan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam indikator yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana.. Hasil dan analisis kualitatif terhadap masing- masing dimensi dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

Standar dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah cukup jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2022 serta Surat Edaran mengenai penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai dasar pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mewujudkan pengelolaan arsip dan surat menyurat secara elektronik. Namun, meskipun tujuan kebijakan sudah ditetapkan dengan jelas, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masih terdapat OPD yang belum memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh. Sebagian pelaksana hanya memahami aplikasi sebagai media surat menyurat elektronik, padahal aplikasi SRIKANDI juga digunakan dalam pengelolaan arsip elektronik secara terintegrasi. Selain itu, penggunaan aplikasi di beberapa OPD juga belum dilakukan secara konsisten sehingga tujuan digitalisasi administrasi belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum dipahami secara merata oleh seluruh pelaksana kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dijelaskan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas, realistis, dan dipahami oleh pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan secara menyeluruh, makampelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan dan tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal.

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, meskipun aturan dan tujuan kebijakan sudah tersedia, namun masih terdapat perbedaan pemahaman antar OPD terkait fungsi dan tujuan penggunaan aplikasi. Hal tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi belum berjalan secara merata dan masih ditemukan penggunaan sistem manual dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah cukup jelas, namun pemahaman pelaksana terhadap tujuan penggunaan aplikasi masih belum merata sehingga implementasi aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara optimal di seluruh OPD.

Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut terlihat dari masih adanya keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta kemampuan pelaksana dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI. Dalam pelaksanaannya, beberapa OPD masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi karena tidak semua pegawai memahami sistem administrasi berbasis digital.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, penggunaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD masih bergantung pada operator tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan aplikasi belum dimiliki secara merata oleh seluruh pegawai. Selain itu, ketika operator tidak berada di tempat atau mengalami kendala teknis, penggunaan aplikasi menjadi terhambat sehingga proses administrasi kembali dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi aplikasi SRIKANDI masih belum optimal.

Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa OPD masih mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat komputer yang digunakan dalam operasional aplikasi. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan lancar dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi berbasis elektronik.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, fasilitas, kemampuan pelaksana, serta dukungan sarana dan prasarana. Implementasi kebijakan akan sulit berjalan optimal apabila sumber daya yang tersedia belum memadai.

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, keterbatasan kemampuan pegawai dan fasilitas pendukung menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan aplikasi di seluruh OPD. Selain itu, kurang meratanya kemampuan penggunaan aplikasi juga menyebabkan implementasi aplikasi masih bergantung pada operator tertentu dan belum melibatkan seluruh pegawai secara aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum optimal, baik dari sisi kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Hal tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara maksimal dan masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan administrasi berbasis digital di beberapa OPD.

Komunikasi antar pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antar pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sudah dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kepada OPD. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui grup koordinasi dan konsultasi langsung ketika OPD mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Adanya kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya penyampaian informasi terkait penggunaan aplikasi kepada pelaksana kebijakan.

Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi antar pelaksana masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi wawancara, Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat awal dan belum diikuti dengan pendampingan secara berkelanjutan dan sosialisasi penggunaan aplikasi umumnya hanya diikuti oleh operator atau admin tertentu sehingga informasi yang diterima belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai di OPD. Akibatnya, masih terdapat pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI dan lebih memilih menggunakan sistem manual dalam kegiatan administrasi.

Selain itu, koordinasi penggunaan aplikasi di beberapa OPD juga belum berjalan secara konsisten. Ketika terjadi kendala penggunaan aplikasi, tidak semua OPD aktif melakukan koordinasi dengan pihak LKD atau Tim Helpdesk. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian masalah penggunaan aplikasi menjadi lambat dan mempengaruhi konsistensi penggunaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan

dengan penyampaian informasi, koordinasi, dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Komunikasi yang baik akan membantu pelaksana memahami tujuan dan prosedur kebijakan secara jelas sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten di seluruh OPD.

Karakteristik organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah memiliki bentuk dukungan organisasi yang cukup jelas. Hal tersebut terlihat dari adanya penunjukan operator aplikasi pada masing-masing OPD serta pembentukan Tim Helpdesk sebagai pendukung pelaksanaan aplikasi SRIKANDI. Pembentukan struktur pelaksana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk mendukung implementasi administrasi berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Namun dalam pelaksanaannya, karakteristik organisasi pelaksana masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, penggunaan aplikasi SRIKANDI di beberapa OPD masih bergantung pada operator tertentu dan belum melibatkan seluruh pegawai secara aktif. Selain itu, pembagian tugas penggunaan aplikasi juga belum berjalan secara merata sehingga ketika operator tidak berada di tempat, penggunaan aplikasi menjadi terhambat.

Selain itu, meskipun Tim Helpdesk sudah dibentuk melalui Surat Keputusan, namun pelaksanaan pendampingan dan bantuan teknis belum berjalan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena jumlah OPD yang cukup banyak serta kemampuan penggunaan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi dan pendampingan penggunaan aplikasi belum berjalan secara efektif di seluruh OPD.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang baik, dan koordinasi yang efektif akan lebih mudah menjalankan kebijakan secara optimal.

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, struktur pelaksana sebenarnya sudah dibentuk, namun dalam praktiknya pelaksanaan tugas masih belum berjalan secara maksimal. Penggunaan aplikasi yang masih bergantung pada operator tertentu menunjukkan bahwa implementasi aplikasi belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem kerja organisasi. Selain itu, pendampingan teknis yang belum optimal juga mempengaruhi pelaksanaan aplikasi di beberapa OPD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah memiliki struktur pendukung implementasi, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Pembagian tugas yang belum merata dan ketergantungan terhadap operator tertentu menyebabkan implementasi aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara maksimal di seluruh OPD.

Lingkungan sosial politik ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi memiliki pengaruh terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Dari sisi lingkungan politik, pada awal penerapan aplikasi SRIKANDI penggunaan aplikasi cukup aktif karena adanya dukungan dan perhatian dari pimpinan daerah terhadap digitalisasi administrasi pemerintahan. Dukungan tersebut terlihat dari adanya kebijakan dan arahan penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan OPD Kota Bengkulu.

Namun setelah terjadi pergantian pimpinan daerah, perhatian dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi mulai berkurang. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut menyebabkan tingkat penggunaan aplikasi di beberapa OPD menjadi kurang konsisten. Beberapa OPD tidak lagi terlalu aktif menggunakan aplikasi karena pengawasan dan dorongan penggunaan aplikasi tidak sekuat pada awal penerapan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan pimpinan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Selain faktor politik, lingkungan sosial juga mempengaruhi implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan sistem manual dalam kegiatan administrasi dan surat menyurat. Kebiasaan tersebut menyebabkan proses adaptasi terhadap penggunaan aplikasi digital berjalan cukup lambat. Sebagian pegawai juga merasa lebih nyaman menggunakan sistem manual dibandingkan aplikasi elektronik karena sudah menjadi pola kerja yang digunakan selama bertahun-tahun.

Dari sisi ekonomi, meskipun tidak menjadi hambatan utama, namun kesiapan fasilitas pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet tetap mempengaruhi penggunaan aplikasi

SRIKANDI di beberapa OPD. Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi belum berjalan maksimal dalam mendukung administrasi berbasis elektronik.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, berkurangnya dukungan pimpinan setelah pergantian kepala daerah serta budaya kerja pegawai yang masih terbiasa menggunakan sistem manual menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Berkurangnya perhatian pimpinan dan budaya kerja manual yang masih kuat menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara optimal di seluruh OPD Kota Bengkulu.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian pelaksana menerima dan mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI karena dinilai dapat membantu pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dalam proses surat menyurat elektronik. Hal tersebut terlihat dari beberapa OPD yang sudah mulai aktif menggunakan aplikasi dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian pegawai yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pegawai masih merasa kesulitan menggunakan aplikasi karena belum terbiasa menggunakan sistem digital. Selain itu, sebagian pegawai juga masih lebih nyaman menggunakan sistem manual karena sudah menjadi kebiasaan dalam pekerjaan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi di beberapa OPD belum berjalan secara konsisten.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dan komitmen pelaksana terhadap penggunaan aplikasi masih berbeda-beda di setiap OPD. Pegawai yang sudah terbiasa menggunakan teknologi cenderung lebih mudah menerima penggunaan aplikasi SRIKANDI, sedangkan pegawai yang belum terbiasa masih membutuhkan pendampingan dalam penggunaannya. Selain itu, masih terdapat pegawai yang kurang percaya diri menggunakan aplikasi sehingga lebih sering meminta bantuan operator atau kembali menggunakan cara manual ketika mengalami kendala.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan sikap pelaksana yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, disposisi pelaksana belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan karena masih terdapat pegawai yang belum siap beradaptasi dengan sistem administrasi berbasis digital. Selain itu, kebiasaan penggunaan sistem manual juga mempengaruhi tingkat konsistensi penggunaan aplikasi di beberapa OPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum optimal. Meskipun sebagian pelaksana sudah menerima penggunaan aplikasi, namun masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem digital dan lebih nyaman menggunakan sistem manual sehingga penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara maksimal di seluruh OPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Lembaga kearsipan daerah dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hasil penelitian mengenai implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa OPD yang belum aktif dan belum konsisten dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI pada administrasi pemerintahan. Dalam teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang terdiri dari enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi, lingkungan sosial politik ekonomi dan disposisi dapat disimpulkan bahwa :

Standar dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu sebenarnya sudah cukup jelas dengan adanya Peraturan Walikota dan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai dasar pelaksanaan administrasi berbasis elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat perbedaan pemahaman antar OPD mengenai fungsi dan tujuan penggunaan aplikasi sehingga implementasi aplikasi belum berjalan secara maksimal di seluruh OPD.

Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum memadai. Hal tersebut terlihat dari masih adanya pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi secara baik, penggunaan aplikasi yang masih bergantung pada operator tertentu, serta kendala fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan perangkat komputer. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan optimal di beberapa OPD.

Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI sebenarnya sudah dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan dari LKD kepada OPD. Namun komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara merata karena informasi penggunaan aplikasi belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai. Akibatnya, masih terdapat perbedaan pemahaman dan penggunaan aplikasi di masing-masing OPD.

Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi aplikasi SRIKANDI menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah membentuk Tim Helpdesk dan menunjuk operator pada masing-masing OPD. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan aplikasi masih bergantung pada operator tertentu dan pembagian tugas belum berjalan secara maksimal sehingga implementasi aplikasi belum berjalan optimal di seluruh OPD Kota Bengkulu.

Lingkungan sosial politik ekonomi

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Berkurangnya perhatian dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi setelah pergantian pimpinan serta budaya kerja pegawai yang masih terbiasa menggunakan sistem manual menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian pelaksana menerima penggunaan aplikasi karena dianggap membantu pekerjaan administrasi, namun masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem digital dan lebih nyaman menggunakan sistem manual. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI belum berjalan secara konsisten di seluruh OPD Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, M. N., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., & Politik, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Arsip Nasional Republik Indonesia*. 2, s167–185.
- Aristriya, D. (2024). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan*. 11(2), 141–147.
- Diana Sari Pratiwi, I. H. D. (2018). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah*.
- Eka, A. S., & Padang, U. N. (1854). *A S I N*. 5, 4572–4588.
- Fauzi, E. A., & Purnamawati, N. (2025). *Definisi Konseptual E-Government Dan E-Governance : Analisis Komparatif*. 12(1), 16–22.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 8(2), 88–101.
- Hadijah, A. R. (2024). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stia Tabalong*, 7, 1479–1497.
- Harvi Dasnoer, Aldri Frinaldi, L. M. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang*. 9(16), 319–324.
- Hasanah, S., P.W, B., Kusumawardani, G., Sutarwinarmo, M. H., Bawono, H., & Juliet, S. S. (2022). *A Kajian Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia*. <https://Anri.Go.Id/Download/Kajian-Fungsi-Lembaga-Kearsipan-Daerah-1675046946>
- Hikmah Norul, Agus Surya Dharma, M. A. (2024). Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan. *Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kabupaten Tabalong*, 1(3063–4059), 12. <https://Ejurnal.Stiaamuntai.Ac.Id/Index.Php/Jkdpk/Article/Download/687/567>
- Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, Dan F. H. (2021). *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)*. 22(2), 105–122.
- Joko Pramono. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 21(2), 1–144. [Http://Thejournalish.Com/Ojs/Index.Php/Thejournalish/Article/View/7](http://Thejournalish.Com/Ojs/Index.Php/Thejournalish/Article/View/7)
- Lestari, D. P., & Ramadhanti, D. (2024). *Analisa E-Government Dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang*. 1– 10.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69– 73.
- Mahmudah, L. N., & Utami, D. A. (2025). Pengelolaan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi Srikandi Pada Kantorkecamatan Widang Kabupaten Tuban. *Inovant*, 3(3), 2025–2253.
- Mubarok, A. S. (2026). *Analisis Perencanaan Organisasi Dan Bentuk Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai : Studi Literatur*. 3(November 2025).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). *Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. 11, 101–112.
- Norul Hikmah, Agus Surya Dharma, M. A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 121–130.
- Novliza Eka Patrisia, Kismartini Kismartini, L. A. (2021). *Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Slawe Di Kota Bengkulu*. 10(2), 137–146.

- Patrisia, Novliza Eka, Faizal Anwar, Astri Dwi S. (2021). *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. 10(1).
- Priyono. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3, Number 17). [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab Iii.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab%20iii.Pdf)
- Rifai, M. (2025). *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta*. Universitas Apmd Yogyakarta.
- Salma, A., Dwiki, G., Aryono, P., & Bangsa, U. B. (2025). *Implementasi Aplikasi Srikandi Dalam Pengelolaan Arsip Digital Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang*. 9(4), 200–203.
- Studi, P., Administrasi, I., Madiun, U. M., Jalan, A., Taman, K., & Madiun, K. (2025). *Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Madiun*. 26, 36–43.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Yosefa Freinademetz Aso Ladapase, Jacoba D. Niga, Belandina L. Long, A. Y. P. (2025). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kupang. *Journal Education And Government Wiyata*, 3, 474–486.
- Yulia Nurul Aini. (2023). Pengelolaan Arsip Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*, 7(95), 84–88.